



Biro Administrasi Pembangunan Daerah  
Setda Provinsi Jawa Tengah

# LAPORAN EVALUASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Semester I Tahun 2023

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

kunjungi kami :

instagram : @bangda\_jateng

website : [bangda.jatengprov.go.id](http://bangda.jatengprov.go.id)

youtube : [BiroAdmBangdaProvJateng](https://www.youtube.com/BiroAdmBangdaProvJateng)

## KATA PENGANTAR

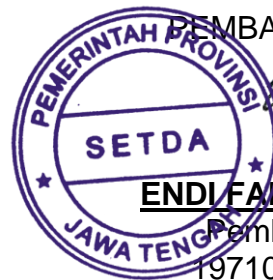
Segala Puji kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I tahun 2023 lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah dapat diselesaikan.

Kegiatan evaluasi atas penanganan situasi benturan kepentingan dilakukan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu diciptakan lingkungan yang dapat menimbulkan perilaku positif, kondusif dan terbebas dari adanya Benturan Kepentingan.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi kemajuan organisasi Biro Administrasi Pembangunan Daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait. Demikian kami disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, Juni 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH



**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**

Pembina Utama Muda  
19710909 199603 1 006

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	2
<b>Bab II Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan .....</b>	<b>3</b>
2.1 Sosialisasi.....	3
2.2 Identifikasi .....	3
2.3 Pencegahan .....	4
2.4 Penanganan Benturan Kepentingan .....	4
2.5 Pelaporan .....	4
<b>Bab III Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan.....</b>	<b>6</b>
3.1 Monitoring dan Evaluasi.....	6
3.2 Rencana aksi .....	6
<b>Bab IV Penutup .....</b>	<b>7</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Komitmen Reformasi Birokrasi di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta terbebas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku yang mengarah kepada tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satunya adalah kondisi dimana organisasi terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Terkait dengan interaksi tersebut, seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai khususnya di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pegawai dalam mengemban tugas dan fungsinya.

Untuk mencegah masalah tersebut Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi adanya benturan kepentingan pada unit organisasi maupun pejabat/pegawai di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Penanganan benturan kepentingan diharapkan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika hubungan interaksi yang baik antar pihak.

## **I.2 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **I.3 TUJUAN**

Tujuan evaluasi internal Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:

1. Mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
2. Laporan terhadap kinerja terhadap kinerja penanganan benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
3. Pedoman perbaikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### 2.1 SOSIALISASI

Pelaksanaan sosialisasi penanganan benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah diimplementasikan dalam bentuk visual berupa standing banner, publikasi terkait bentuk-bentuk benturan kepentingan melalui sosial media dan papan pengumuman serta penguatan nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum.

Disamping itu juga telah dibuka kanal pelaporan gratifikasi internal Biro Bangda dan untuk masyarakat sebagai wadah pengaduan apabila diindikasikan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Biro Bangda.

#### 2.2 IDENTIFIKASI

Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada tahun 2023 yang hasilnya sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan**  
**Tahun 2023**

No	Jenis Benturan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Detail Benturan Kepentingan	Penyebab	Upaya Pencegahan
1.	Gratifikasi	Bagian PAPP, PAPPW dan PAPPD	Pemberian gratifikasi pada saat melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan dengan harapan terbangunnya hubungan baik	kurang pemahaman terkait bentuk-bentuk gratifikasi	1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan 2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum 3. Dokumen Surat Perintah Tugas

					(SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
--	--	--	--	--	--

### 2.3 PENCEGAHAN

Pencegahan yang sudah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terkait benturan kepentingan
2. Penguatan nilai-nilai integritas yang disisipkan dalam forum-forum
3. Dokumen Surat Perintah Tugas (SPT) Perjalanan Dinas tercantum perintah tidak menerima gratifikasi
4. Membuat kanal pelaporan pengaduan gratifikasi

### 2.4 PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Adapun penanganan benturan kepentingan yang sudah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan seluruh upaya pencegahan sebagaimana tertera pada poin 2.3

### 2.5 PELAPORAN

Tidak ditemukan adanya laporan terjadinya benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah pada semester I tahun 2023.

**Tabel 2.2**

**Matriks Permasalahan Benturan Kepentingan di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha Biro	0
2	Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN dan APBD	0

3	Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	0
4	Bagian Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan	0



## **BAB III**

### **EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **4.1 MONITORING DAN EVALUASI**

Adapun hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya tim satgas penanganan benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
2. Belum tersedianya kanal pelaporan benturan kepentingan serta SOP Pelaporan Benturan Kepentingan dan pengidentifikasian benturan kepentingan oleh unit kerja di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

#### **4.2 RENCANA AKSI**

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka penanganan benturan kepentingan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dalam bentuk forum di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.
2. Membentuk tim satgas penanganan benturan kepentingan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

## BAB IV

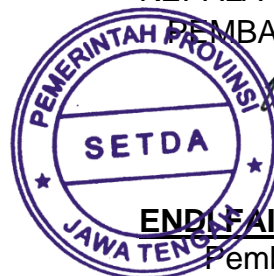
### PENUTUP

Penanganan benturan kepentingan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, namun membutuhkan kontribusi dan keterlibatan dari seluruh pihak di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam menangani benturan kepentingan harapannya kedepan akan terwujud organisasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang kemudian mewujudkan pula pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good government).

Laporan Penanganan Benturan Kepentingan ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan pengawasan dan perbaikan kualitas Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Laporan ini kami buat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami terhadap Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Semoga laporan ini dapat membawa manfaat dalam pengendalian benturan kepentingan di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, Juni 2023

KEPALA BIRO ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH



**ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA**

Pembina Utama Muda  
19710909 199603 1 006

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Banner Benturan Kepentingan

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

Stop  
Gratifikasi

LIHAT  
LAWAN  
LAPORKAN

WHISTLE  
BLOWING  
SYSTEM

LAPORKAN !  
JIKA ANDA MELIHAT  
DAN MENDENGAR  
PELANGGARAN/  
KECURANGAN DARI  
PEJABAT/PEGAWAI  
LINGKUNGAN BIRO  
ADMINISTRASI  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

LINK PENGADUAN  
<http://bit.ly/aduanbangdajateng>

Follow Us!  
@bangda\_jateng  
[bangda.jatengprov.go.id](http://bangda.jatengprov.go.id)  
BiroAdmBangdaProvJateng

## Lampiran 2. Surat Perintah Tugas



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

#### SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : 094/42

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
  2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
  3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
  4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

#### MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : ENDI FAIZ EFFENDI, SPI, MA
- NIP : 19710909 199603 1 006
- Pangkat, Gol. ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
- Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Untuk :

1. Melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pendampingan tim penilai BAPPENAS perihal Penilaian Tahap III Verifikasi Tingkat Provinsi PPD Tahun 2022 pada tanggal 8 April 2022 di Kabupaten Magelang.
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pejabat pemberi tugas.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



## Lampiran 4. Kanal Pengaduan



whistle blowing system

IDENTITAS PELAPOR DIRAHASIAKAN

LAPORKAN !  
JIKA ANDA MELIHAT DAN MENDENGAR PELANGGARAN/KECURANGAN DARI REKAN KERJA

scan me !

Follow us !  
@bangda\_jateng  
bangda.jatengprov.go.id  
BiroAdmBangdaProvJateng

The poster features a large graphic of a hand holding a whistle, with the text 'whistle blowing system' in a stylized font. Below this, it says 'IDENTITAS PELAPOR DIRAHASIAKAN' (Reporter Identity Protected). The main message is 'LAPORKAN ! JIKA ANDA MELIHAT DAN MENDENGAR PELANGGARAN/KECURANGAN DARI REKAN KERJA' (Report! If you see and hear violations/irregularities from colleagues). A QR code is labeled 'scan me !'. At the bottom, there are social media handles: '@bangda\_jateng', 'bangda.jatengprov.go.id', and 'BiroAdmBangdaProvJateng'. An illustration of a woman holding a phone is also present.



BANGDA NEW ERA  
Ari, Bangda, Bangda\_Max, Bangda\_Zaki, Bu, Bu, Bu, Danang, Dedy, C

whistle blowing system

LAPORKAN !  
JIKA ANDA MELIHAT DAN MENDENGAR PELANGGARAN/KECURANGAN DARI REKAN KERJA

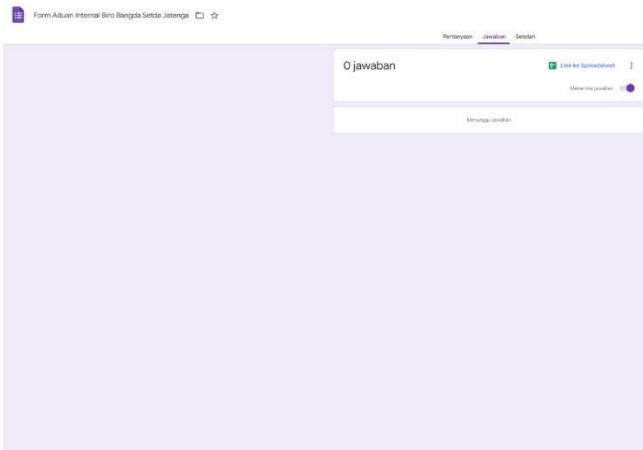
scan me !

Follow us !  
@bangda\_jateng  
bangda.jatengprov.go.id  
BiroAdmBangdaProvJateng

Selamat Siang Bapak/Ibu dalam rangka mendukung pencegahan korupsi di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah, kami menyelenggarakan sistem whistleblowing internal guna mengurangi adanya risiko penyimpangan. Dimohon kepada Bapak/Ibu apabila terdapat indikasi korupsi di lingkungan Biro Bangda, bisa dilaporkan pada link <https://bit.ly/aduaninternalbangdajateng>. Kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi identitas Bapak/Ibu. Terimakasih atas partisipasinya.

Mas Reo  
Siap, terimakasih bu

The WhatsApp post shows a screenshot of a message. It includes the same poster content as above. The text of the message says: 'Selamat Siang Bapak/Ibu dalam rangka mendukung pencegahan korupsi di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Daerah, kami menyelenggarakan sistem whistleblowing internal guna mengurangi adanya risiko penyimpangan. Dimohon kepada Bapak/Ibu apabila terdapat indikasi korupsi di lingkungan Biro Bangda, bisa dilaporkan pada link https://bit.ly/aduaninternalbangdajateng. Kami mengharapkan partisipasi Bapak/Ibu sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Kami berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi identitas Bapak/Ibu. Terimakasih atas partisipasinya.' A reply from 'Mas Reo' says 'Siap, terimakasih bu'.



Form Aduan Internal Biro Bangda Setda Jateng

0 jawaban

Link ke Submission

Masukkan jawaban

Menunggu jawaban

The image shows a screenshot of an internal reporting form. At the top, it says 'Form Aduan Internal Biro Bangda Setda Jateng'. Below that, there are fields for '0 jawaban' (0 answers), a 'Link ke Submission' button, a 'Masukkan jawaban' (Enter answer) field, and a 'Menunggu jawaban' (Waiting for answer) status.



bangda\_jateng

FOLLOW SOSIAL MEDIA BIRO BANGDA

@bangdajateng

BiroAdmBangdaProvJateng

bangda.jatengprov.go.id

www

Link Aduan Masyarakat

Liked by reocavallera and 10 others

bangda\_jateng #SobatBangda ... Dalam Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Semester I Periode Januari s.d....more

The social media post features a blue background with a white cat illustration. It lists social media handles: '@bangdajateng' on Instagram, 'BiroAdmBangdaProvJateng' on YouTube, and 'bangda.jatengprov.go.id' on the website. It also includes a QR code and the text 'Link Aduan Masyarakat'. Below the post, it shows engagement: 'Liked by reocavallera and 10 others' and a caption: 'bangda\_jateng #SobatBangda ... Dalam Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Semester I Periode Januari s.d....more'.